

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 114 A Kajangan Sonorejo Blora

Nomor Telepon : 0296 525114

Penjelasan Umum : PT.BPR BKK BLORA (PERSERODA) DALAM MELAKSANAKAN TATA KELOLA SENANTIASA BERLANDASKAN PADA LIMA PRINSIP DI ATAS. DALAM RANGKAIAN UNTUK MEMBUDAYAKAN PENERAPAN 5 (LIMA) PRINSIP DASAR TATA KELOLA, BANK MELAKUKAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) SECARA BERKALA YANG PALING KURANG MELIPUTI 9 (SEMBILAN) FAKTOR PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA YAITU : 1.PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI,2.PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS,3.KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE,4.PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN,5.PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN,6.PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN,7.BATAS MAKSIMUN PEMBERIAN KREDIT,8.RENCANA BISNIS BANK,9.TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN. URAIAN SINGKAT DARI PRINSIP PELAKSANAAN TATA KELOLA PADA PT. BPR BKK BLORA (PERSERODA) ADALAH SEBAGAI BERIKUT : 1.KETERBUKAAN (TRANSPARENCY),2.AKUNTABILITAS (ACCOUNTIBILITY),3.TANGGUNG JAWAB (RESPONSIBILITY),4. INDEPENDENSI (INDEPENDENCY),5.KEWAJARAN (FAIRNESS).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	PUGUH HARYONO	Direktur Utama	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DIREKSI TELAH MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN TATA KELOLA YAKNI SEBAGAI BERIKUT: A.DIREKSI TELAH MENGELOLA BANK SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWABNYA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.B.DIREKSI SENANTIASA MENINDAKLANJUTI TEMUAN AUDIT DAN REKOMENDASI DARI SATUAN KERJA AUDIT INTERN BANK, AUDITOR EKSTERNAL, HASIL PENGAWASAN OJK, PPAK DAN/ATAU HASIL PENGAWASAN OTORITAS LAIN.C.DIREKSI PT BPR BKK BLORA (PERSERODA) TELAH MELAKSANAKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA BPR DALAM SETIAP KEGIATAN USAHA BANK PADA SELURUH TINGKATAN ATAU JENJANG ORGANISASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA, ANGGOTA DIREKSI WAJIB MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN ATAU PELATIHAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN BANK.D.DIREKSI PT.BPR BKK BLORA (PERSERODA) BERTANGGUNGJAWAB DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA UNTUK KEPENTINGAN BANK DALAM MENCAPAI MAKSUD DAN TUJUANNYA.E.DIREKSI TELAH MENGAWASI DAN MEMASTIKAN BAHWA SELURUH KOMPONEN YAITU MELIPUTI:SOP,KEBIJAKAN DAN ATURAN YANG TELAH DIIMPLEMENTASIKAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Footer 1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Iwannudin Iskandar	Komisaris Utama	a.Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola BPR telah dilaksanakan.b.Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.c.Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank.d.Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank,Auditor eksternal,hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.e.Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota,yang mengatur tentang Etika kerja,Waktu kerja,Pengaturan rapat,Pelaporan dan Pertanggungjawaban,Penghasilan dan Penghargaan.f.Dewan Komisaris senantiasa menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank secara semesteran kepada OJK dengan tepat waktu.g.Di dalam Laporan pelaksanaan Rencana kerja beberapa rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi untuk pengembangan PT.BPR BKK BLORA (Perseroda) ke depan antara lain:Direksi agar mengambil langkah-langkah guna meningkatkan kinerja bank,Dirkesi agar melakukan upaya-upaya lebih keras dalam peningkatan kredit bermasalah,Direksi agar lebih meningkatkan kinerja untuk semester II tahun 2021,Dirkesi agar merencanakan pengembangan usaha baru agar dilakukan akselerasi pelaksanaanya dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Slamet Pamuji	Komisaris Utama dan Independen	a.Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola BPR telah dilaksanakan.b.Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.c.Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank.d.Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank,Auditor eksternal,hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.e.Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota,yang mengatur tentang Etika kerja,Waktu kerja,Pengaturan rapat,Pelaporan dan Pertanggungjawaban,Penghasilan dan Penghargaan.f.Dewan Komisaris senantiasa menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank secara semesteran kepada OJK dengan tepat waktu.g.Di dalam Laporan pelaksanaan Rencana kerja beberapa rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi untuk pengembangan PT.BPR BKK BLORA (Perseroda) ke depan antara lain:Direksi agar mengambil langkah-langkah guna meningkatkan kinerja bank,Dirkesi agar melakukan upaya-upaya lebih keras dalam peningkatan kredit bermasalah,Dirkesi agar lebih meningkatkan kinerja untuk semester II tahun 2021,Dirkesi agar merencanakan pengembangan usaha baru agar dilakukan akselerasi pelaksanaannya dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait.

Rekomendasi Kepada Direksi

SEMUA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS MEMENUHI PERSYARATAN TELAH LULUS PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) SESUAI DENGAN KETENTUAN OJK TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST). - IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.HUM MENJABAT SEBAGAI KETUA DEWAN KOMISARIS SETELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN MELALUI SURAT NOMOR : KEP-76/KR.41/2015 TERTANGGAL 31 AGUSTUS 2015 PERIHAL KEPUTUSAN UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) DARI IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.HUM MENJADI KETUA DEWAN KOMISARIS. - SLAMET PAMUJI, SH.M.HUM MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SETELAH TERCATAT DALAM OTORITAS JASA KEUANGAN MELALUI SURAT NOMOR : S-517/KR.0313/2021 MENJADI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS. TIDAK ADA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS MERANGKAP JABATAN SEBAGAI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PADA LEMBAGA/PERUSAHAAN LAIN. SELAIN PERSYARATAN BERUPA JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS SEPERTI YANG DITENTUKAN OLEH OJK, SEMUA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS MEMENUHI PERSYARATAN INTEGRITAS, KOMPETENSI DAN REPUTASI KEUANGAN SEHINGGA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN UNTUK KEPENTINGAN BPR DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN BAIK. SEMUA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS MEMILIKI INTEGRITAS PALING KURANG MENCAKUP : - MEMILIKI AKHLAK DAN MORAL YANG BAIK, ANTARA LAIN DITUNJUKKAN DENGAN SIKAP MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU, TERMASUK TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM WAKTU 20 (DUA PULUH) TAHUN TERAKHIR SEBELUM DICALONKAN; - MEMILIKI KOMITMEN UNTUK MEMATUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU; - MEMILIKI KOMITMEN TERHADAP PENGEMBANGAN OPERASIONAL BANK YANG SEHAT; - TIDAK TERMASUK DALAM DAFTAR TIDAK LULUS UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST).

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4/POJK.03/2017 PERIHAL : PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BPR BAHWA BPR DENGAN MODAL INTI PALING SEDIKIT RP. 80.000.000.000 (DELAPAN PULUH MILIAR RUPIAH) WAJIB UNTUK MEMBENTUK KOMITE. PADA POSISI 31 DESEMBER 2021 PT.BPR BKK BLORA (PERSERODA) KOMPOSISI MODAL INTI SEBESAR RP. 47.266.021,- (EMPAT PULUH TUJUH MILYAR DUA RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA DUA PULUH SATU RIBU RUPIAH), SEHINGGA BELUM WAJIB MEMBENTUK KOMITE - KOMITE.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BERDASARKAN POJK NO 4 /POJK.03/2017 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BANK BELUM WAJIB MEMBENTUK KOMITE DISEBABKAN KARENA MODAL INTI SEBESAR RP. 46.554.737.474

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BANK BELUM MEMBENTUK KOMITE KARENA MODAL BANK DIBAWAH RP. 50.000.000.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

DIREKSI TIDAK MEMILIKI SAHAM PADA BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

TIDAK ADA KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA BPR, SAHAM DARI PEMPROV JATENG DAN PEMKAB BLORA

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	PUGUH HARYONO	0	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

TIDAK ADA KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA BPR, SAHAM DARI PEMPROV JATENG DAN PEMKAB BLORA

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	PUGUH HARYONO	0	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

DIREKTUR UTAMA BERASAL DARI PIHAK YANG INDEPENDEN TERHADAP PEMEGANG SAHAM PENGENDALI YAKNI TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KEUANGAN, KEPENGURUSAN, KEPEMILIKAN SAHAM, DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI ATAU HUBUNGAN DENGAN BPR SEHINGGA TIDAK MEMPENGARUHI KEMAMPUANNYA UNTUK BERTINDAK INDEPENDEN.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

DEWAN KOMISARIS TIDAK ADA KEPEMILIKAN SAHAM TERHADAP MODAL DI BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMILIK SAHAM DIPERUSAHAAN LAIN

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Iwannudin Iskandar	0	0	0
2	Slamet Pamuji	0	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

SELURUH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KEUANGAN, KEPENGURUSAN, KEPEMILIKAN SAHAM, DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI ATAU HUBUNGAN DENGAN BANK SEHINGGA TIDAK MEMPENGARUHI KEMAMPUANNYA UNTUK BERTINDAK INDEPENDEN. KEBERADAAN PENGAWAS INDEPENDEN INI DAPAT MENCIPTAKAN CHECK AND BALANCE, MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA SERTA MELINDUNGI KEPENTINGAN STAKEHOLDERS

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Iwannudin Iskandar	0	0	0
2	Slamet Pamuji	0	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

SELURUH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KEUANGAN, KEPENGURUSAN, KEPEMILIKAN SAHAM, DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI ATAU HUBUNGAN DENGAN BANK SEHINGGA TIDAK MEMPENGARUHI KEMAMPUANNYA UNTUK BERTINDAK INDEPENDEN. KEBERADAAN PENGAWAS INDEPENDEN INI DAPAT MENCIPTAKAN CHECK AND BALANCE, MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA SERTA MELINDUNGI KEPENTINGAN STAKEHOLDERS DEWAN KOMISARIS DAN KELUARGA TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	545312106	2	179235607
2	Tunjangan	0	0	0	0
3	Tantiem	2	282257731	2	92375257
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		827569837		271610864

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	0	0
2	Transportasi	0	0
3	Asuransi Kesehatan	0	0
4	Fasilitas lainnya	Fasilitas lainnya	Asuransi kesehatan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PENETAPAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT.BPR BKK BLORA (PERSERODA) DENGAN MEMPERHATIKAN TUGAS, WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN RISIKO BERDASARKAN : A. PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN B. ANGGOTA DIREKSI KARENA JABATANNYA DIBERIKAN GAJI POKOK BESARNYA : - DIREKTUR UTAMA MENERIMA GAJI POKOK MAKSIMAL 2,5 (DUA KOMA LIMA) KALI GAJI POKOK TERTINGGI PADA DAFTAR SKALA GAJI POKOK PEGAWAI; C. DIREKTUR UTAMA MENDAPAT FASILITAS : (A.06 20)- PERAWATAN KESEHATAN YANG LAYAK TERMASUK ISTRI DAN SEBANYAK-BANYAKNYA 2 (DUA) ANAK; - KENDARAAN DINAS - TUNJANGAN - TUNJANGAN YANG LAZIM.C. SESUAI PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 2019 PASAL 20 TENTANG PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN DEWAN KOMISARIS DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:- KETUA DEWAN KOMISARIS MENDAPATKAN HAK PENGHASILAN 40 % (EMPAT PULUH PERSEN) DARI PENGHASILAN DIREKTUR UTAMA; - ANGGOTA DEWAN KOMISARIS MENDAPATKAN HAK PENGHASILAN 80 % (DELAPAN PULUH PERSEN) DARI PENGHASILAN KETUA DEWAN KOMISARIS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,07	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,05	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,01	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PERBANDINGAN GAJI TERTINGGI DENGAN GAJI TERENDAH KOMISARIS, DIREKSI DAN PEGAWAI DISAJIKAN PER POSISI 31 DESEMBER 2021 ADALAH SEBAGAI BERIKUT : - RASIO GAJI PEGAWAI YANG TERTINGGI DAN TERENDAH = 2,7 : 1 - RASIO GAJI DIREKSI YANG TERTINGGI DAN TERENDAH = 1,25 : 1 - RASIO GAJI KOMISARIS YANG TERTINGGI DAN TERENDAH = 1,25 : 1 - RASIO GAJI DIREKTUR UTAMA DENGAN DEWAS TERTINGGI = 2,5 ; 1 - RASIO GAJI DIREKSI TERTINGGI DAN PEGAWAI TERTINGGI = 2,4 : 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	25-01-2021	3	EVALUASI RENCANA BISNIS BANK TRIWIULAN 1 2021
2	07-04-2021	3	EVALUASI RENCANA BISNIS BANK TRIWIULAN 1 2021 DAN AGENDA RAPAT KOORDINASI SERTA PENGAWAN AKTIF DEWAN PENGAWAS
3	10-04-2021	3	EVALUASI RENCANA BISNIS BANK TRIWIULAN 1 2021 DAN AGENDA RAPAT KOORDINASI SERTA PENGAWAN AKTIF DEWAN PENGAWAS
4	26-09-2021	6	RAKOR DENGAN SEMUA BIDANG TERAKIT DENGAN PENANGANAN NPL

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI DIDALASANAKAN DALAM 1 TAHUN 2021 YANG MEMBAHAS EVALUASI RBB TH 2021 DAN RAPAT KOORDINASI SERTA RAPAT KOORDINASI DENGAN SEMUA BIDANG

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Iwannudin Iskandar	4	0	100,00
2	Slamet Pamuji	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BANK PADA TAHUN 2021 TIDAK MENGALAMI PERMASALAHAN HUKUM

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

TAHUN 2021 BELUM ADA TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN BANK BERKOMITMEN UNTUK MENANGANI SEMUA TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DENGAN TUNDUK KEPADA PERATURAN TERKAIT YANG ADA ANTARA LAIN PERATURAN OJK, SEPANJANG TAHUN 2021, TIDAK TERDAPAT TRANSAKSI YANG MELIBATKAN PENGAWAS, DIREKSI, PEJABAT EKSEKUTIF YANG MENGANDUNG POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210130	Kegiatan Sosial	bantuan siwaberprestasi	siswa prakerin di kab Blora	1.000.000
2	20210205	Kegiatan Sosial	penmbutan tenda pegdagang kaki lima	pedagang jkaki lima di alun alun kab Blora	42.250.000
3	20210305	Kegiatan Sosial	bantuan covid 19 di wil kab blora	forum komunikasi wilayah kab Blora	8.500.000
4	20210405	Kegiatan Sosial	Kegiatan Ramadhan Yayasan Gema Mustika, zakat, infaq sodaqoh Berkah ,	Panti asuhan safinatul janah , darul hadlonah,mistahul amal, mardi mulia kab Blora	12.678.000
5	20210505	Kegiatan Sosial	pemberian sembako bantuan ke sekaolah	dekranasda, masyarakat berdampak pandemi	3.500.000
6	20210605	Kegiatan Sosial	batntuan anak berprestasi, anak kurang mampu	wilayah kabupaten Blora	65.373.576
7	20210705	Kegiatan Sosial	kehiatan peletarian lingkungan hidup, penghijauan	DLH dan lingkungan di Wil Kab Blora	51.571.960
8	20211005	Kegiatan Sosial	bantuan gempa, banjir kebakaran, bedah rumah penggerasoakn jalan	foruum dan asosiasi, karang taruna dan masyarakat blora	19.000.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama BPR	: PT BPR BKK Blora (Perseroda)
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Jl. Gatot Subroto No. 114 A Kajangan Sonorejo Blora
Nomor Telepon	: (0296) 525114
Modal Inti BPR	: 49.112.226.350,00
Total Aset BPR	: 367.652.031.415,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,8
Peringkat Komposit	: 3
Analisis	: Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dijalankan dengan melakukan penilaian sendiri (self assesment) dengan mempertimbangkan penilaian kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank, penilaian efektifitas pelaksanaan GCG, serta penilaian kualitas hasil pelaksanaan. Pelaksanaan GCG secara umum telah dilaksanakan PT.BPR BKK BLORA (Perseroda) dengan baik sesuai dengan hasil Penilaian Sendiri (self assesment) sebagaimana terlampir Beberapa penyesuaian terjadi karena :1. Penilaian secara mandiri pada pengawasan aktif Dewan Komisaris yang semula kategori baik dinilai bank cukup baik, 2. Terhadap ketentuan intern yang berlaku yang semula penerapannya baik tetapi di nilai cukup baik, 3. Terhadap pelaporan intern yang semula penilaian penerapan tata kelola baik dinilai cukup baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,59	0,95	0,24	2,78	0.556	BAIK
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,28	1,05	0,30	2,63	0.395	BAIK
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	BAIK
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	1,20	0,20	2,90	0.290	CUKUP BAIK
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,70	1,28	0,30	3,28	0.328	CUKUP BAIK
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,30	1,10	0,25	2,65	0.265	CUKUP BAIK
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	1,20	0,30	2,50	0.063	CUKUP BAIK
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,17	1,20	0,35	2,72	0.272	CUKUP BAIK
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,50	1,20	0,25	2,95	0.221	CUKUP BAIK
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,34	1,20	0,30	2,84	0.213	CUKUP BAIK
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	1,10	0,25	2,85	0.214	CUKUP BAIK
Nilai Komposit						2.8	
Peringkat Komposit						Cukup Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	4	Sampai dengan posii 31 Desember 2021 bank hanya memiliki 1 (satu) orang Direksi, yaitu Direktur Utama
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	3	Direktur Utama bertempat tinggal di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	3	Direktur Utama tidak merangkap Jabatan yang lainnya
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	3	Direktur Utama i tidak ada hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	3	Direktur Utama tidak pernah menggunakan penasihat dan / atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	3	Direktur Utama telah lulus Uji Kompetensi dan mempunyai Sertifikasi Kompetensi serta diangkat melalui RUPS
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	3,17	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,59	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direktur Utama telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen, tidak melakukan pengalihan tugas dan tanggungjawab
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi selalu menindaklanjuti temuan audit Intern maupun ekstern
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi telah menyediakan data informasi kepada Dewan Pengawas yang lengkap
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Apabila dalam pengambilan keputusan yang strategis tidak terjadi perbedaan pendapat Direksi mengambil suara terbanyak
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak pernah menggunakan kepentingan pribadi yang dapat merugikan bank
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi memberikan pendidikan / pelatihan peningkatan kualitas individu kepada para pegawai demi meningkatkan kualitas SDM
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi mampu mengimplementasikan ketentuan prinsip kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	Dalam melaksanakan kerja berpedoman pada etika kerja, waktu kerja
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,95	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	3	Dalam pelaksanaan tugasnya direksi mempertanggungjawabkan lewat RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Direksi mengkomunikasikan kebijakan dan strategis menyampaikan kepada semua pejabat eksekutif dan di teruskan oleh PE kepada semua pegawai
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Risalah hasil rapat Direksi dicatat dalam notulen hasil rapat dan didokumentasikan dengan baik
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Direksi dan seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan yang berguna untuk peningkatan kinerja
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Laporan penerapan Tata kelola tahun 2021 disampaikan kepada OJK, dan Asosiasi BPR
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,24	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	4	Dewan Komisaris BPR BKK Blora sampai dengan posisi 31 Desember 2021 sebanyak 2 orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	4	Jumlah Anggota Dewan Komisaris 2 (Dua) orang dan Jumlah Direksi hanya 1 Orang hal ini kurang baik dalam penerapan tata kelola bank
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kematangan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah Lulus Uji Kemampuan dan Kematangan mempunyai Sertifikasi serta diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah dan salah 1 (Satu) orang Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kabupaten Blora.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bank memiliki modal inti dibawah Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	bank memiliki pedoman dan etika kerja dan dijalankan dan telah diterapkan pada semua bidang
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	3	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris atau Direksi lebih dari 2 (dua) BPR
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keluarga

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	sampai dengan posisi 31 Desember 2021 bank Belum mempunyai Anggota Dewan Komisaris Independen
	Total nilai skala penerapan	23	
	Rata-rata	2,56	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,28	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta memberi nasihat secara tertulis kepada Direksi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Kebijakan yang bersifat strategi selalu dipantau oleh Dewan Komisaris melalui rapat koordinasi
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional di bank
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti hasil temua audit intern maupun ekstern
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Dalam pelaksanaan rapat dewan komisaris dihadiri anggota dewan pengawas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Pengambilan keputusan , dan hasilnya dituangkan dalam risalah rapat yang dicatat dalam notulen hasil rapat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	3	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan kepentingan pribadi atau merugikan perusahaan (bank)
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Anggota Dewan Komisaris belum sepenuhnya melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dikarenakan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan belum terisi
	Total nilai skala penerapan	21	
	Rata-rata	2,63	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,05	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	setiap hasil rapat Dewan komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	BPR telah memiliki Buku Pedoman prosedur Penanganan Benturan Kepentingan di bank
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Dalam hal terjadi benturan kepentingan berpedoman pada POJK NO. 4/POJK.03/2015 dan SE.OJK No. 5/SE.OJK.03/2016 dan Prosedur Kebijakan benturan kepentingan yang ditetapkan bank
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Ya, Ditahun 2019 tidak terjadi keputusan, yang terdapat benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	4	Modal Bank pada posisi 31 Desember 2021 belum sampai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dan kekosongan Jabatan direksi telah di tuangkan dalam RUPS
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	4	Bank belum mempunyai direksi yang membawahkan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan namun bank telah merencanakan pengisian kekosongan jabatan direktur Umum Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan serta Direktur Pemasaran berdasarkan RUPSLB tanggal 9 Juni dan RUPS LB tanggal 05 Agustus 2021
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	3	bank belum mempunyai belum membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen dan bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif sesuai dengan SK Direksi Nomor 25/DIR/KPTS/2021 tanggal 2 Juli 2022 yang melaksanakan fungsi kepatuhan dan manajemen resiko yang telah tercatat dalam Surat Deputi Pengawasan LJK 1 OJK No.S 535/KR.011/2021 tanggal 8 Agustus 2021
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	bank belum menyusun sepenuhnya dan pengkinian pedoman kerja dan sistem prosedur dan pada kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	bank mempunyai ketentuan intern yang mengatur uraian tugas dan tanggung jawab PE yang menangani fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	3,40	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Bank belum mempunyai direksi yang membawahkan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan namun bank telah menunjuk PE yang menangani fungsi kepatuhan termasuk menyampaikan laporan kepada otoritas
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Bank telah mendorong budaya kepatuhan kepada semua karyawan dengan menyampaikan pesan secara lisan pada saat pelatihan rakor
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	4	bank belum mempunyai Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa kebijakan, ketentuan dan sistem dan prosedur serta kegiatan sesuai dengan ketentuan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum sepenuhnya merevisi bahwa kebijakan, ketentuan dan sistem dan prosedur serta kegiatan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	3,20	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,28	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	bank belum sepenuhnya dapat menurunkan terhadap semua pelanggaran

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	laporan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, di karenakan kekosongan jabatan direktur yang membawahkan direktur kepatuhan blm terisi
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Pada tahun 2021 belum terdapat penyimpangan kebijakan dan keputusan Direktur yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundangan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Modal inti Bank dibawah Rp. 50 Milyar, dan telah memiliki Pejabat Eksekutif terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	SKAI telah memiliki pedoman audit dan rencana audit serta program kerja yang telah disetujui Direktur Utama
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	Dalam pelaksanaan audit intern, pejabat SKAI independen terhadap penghimpunan dan penyaluran dana
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	3	SKAI bertanggung jawab terhadap Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Pedoman program rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern masih dalam proses.
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,30	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	Dalam pelaksanaan audit intern berpedoman sesuai ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Keterangan
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan audit intern diawali dengan program kerja dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan berlaku.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Secara berkala SKAI mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh pihak ekstern untuk meningkatkan kemampuan SDM audit intern.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Pelaksanaan audit intern diawali dengan program kerja dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan berlaku dikarenakan blm ada Direktur Umum yang membawahkan fungsi kepatuhan maka SKAI melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	bank telah menyampaikan pokok- pokok hasil laporan dan laporan audit khusus terkait pemberitaan negatif
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	pengangkatan kepala SKAI telah dipalorakan kepada Otoritas jasa Keuangan No.793/KP/X/206 tanggal 25 Oktober 2016
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	KAP yang telah ditunjuk bank telah memenuhi aspek legalitas perjanjian kerja dan standar profesional akuntan publik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	3	audit di tahun 2021 bank menggunakan KAP Tarmizi Accmad dan sudah terdaftar dalam OJK No STTD.AP-81/PB.122/2018 tgl 5 Februari 2018
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	3	bank menyampaikan pada saat audit OJK
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	3	KAP TARMIZI Achmad telah menyampaikan laporan hasil audit KAP
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Cakupan hasil audit sesuai ruang lingkup yg diatur Otoritas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	3	Bank telah menunjuk pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen resiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Telah melekat dalam kebijakan dan prosedur manajemen resiko
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Bank telah membuat dan menyusun kebijakan resiko yang dituangkan dalam Keputusan Direksi No 007/K-DIR/II/2017 Tentang Kebijakan dan Prosedur Manajemen Resiko

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen resiko
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Bank belum sepenuhnya melakukan pemantauan dan pengukuran pada resiko
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Belum sepenuhnya melakukan pengendalian intern secara menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Bank menetapkan tingkat resiko sesuai ketentuan OJK
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Bank telah memiliki sistem core banking yang cukup memadai
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Bank belum sepenuhnya menerapkan budaya sadar resiko yang dilakukan dengan pengembangan SDM
	Total nilai skala penerapan	21	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Bank telah menyusun laporan profil resiko dan melaporkan ke OJK
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	bank belum menyusun dan membuat produk baru
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	3,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,35	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	bank telah memiliki ketentuan BMPK yang mengacu pada PKPB No 03 tahun 2020
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Bank telah menyesuaikan PKPB NO 3 TAHUN 2020 TANGGAL 16 Juli 2020
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	Bank dalam pemberian kredit kepada pihak terkait tidak melanggar dan atau melampaui BMPK.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Bank dalam pemberian kredit kepada pihak terkait tidak melanggar dan atau melampaui BMPK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK dalam penyaluran dana.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	RBB bank telah disusun oleh direksi dan mendapat persetujuan dewan komisaris.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	RBB yang disusun telah sesuai dengan ketentuan OJK.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	RBB tahun 2022 disahkan oleh pemegang saham dalam RUPSLB.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	RBB BPR telah disusun sesuai dengan cakupan yang ada dalam ketentuan POJK.15/POJK.03/2021 dan SEOJK.03/2021 tanggal 24 Agustus 2021
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dewan Komisaris Laporan Pengawasan kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Untuk RBB bank serta perubahan disampaikan kepada ojk
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem core banking yang digunakan oleh BPR telah memadai sesuai dengan ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Laporan keuangan Publikasi telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Keuangan Tahunan 2022 telah disusun dan diaudit oleh KAP sesuai dengan ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Bank telah melaksanakan transparansi dan informasi produk sesuai dengan ketentuan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Bank telah menyusun laporan sesuai dengan ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank telah melaporkan Publikasi ke OJK Triwulan IV Tahun 2021 pada tanggal 2020 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	3	Tahun 2021 tidak terjadi pengaduan nasabah dan BPR telah melaporkan pengaduan nasabah dengan hasil Nihil melalui SIPEDULI.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

KESIMPULAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

3.

Nama

:

PUGUH HARYONO
- JABATAN

:

DIREKTUR UTAMA
4.

NAMA

:

IWANUDDIN ISKANDAR, SH.M Hum
- JABATAN

:

KOMISARIS UTAMA

Dengan ini memberikan persetujuan atas lapoan hasil Tata Kelola PT. BPR BKK Blora (PERSERODA) urntuk periode 31 Desember 2021 sebagai berikut :

NAMA BPR	PT. BPR BKK BLORA (PERSERODA)
Posisi Laporan	31 Desember 2021
ALamat	Jl. Gatot Subroto No 114A Blora
Nomor Telepon	(0296) 525114
Modal Inti BPR	Rp. 49.112.226.350
Total Aset BPR	Rp 367.652.031.415,-
Bpbot BPR	C
Status Audit Ekstern	1
Nilai Komposit	2,8
Penringkat Komposit	Cukup Baik
Analisis	Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dijalankan dengan melakukan penilaian sendiri (self assesment) dengan mempertimbangkan penilaian kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank, penilaian efektifitas pelaksanaan GCG, serta penilaian kualiatas hasil pelaksanaan. Pelaksanaan GCG secara umum telah dilaksanakan PT.BPR BKK BLORA (Perseroda) dengan baik sesuai dengan hasil Penilaian Sendiri (self assessment) dengan nilai komposit 2,8 dengan peringkat cukup baik Beberapa penyesuaian terjadi karena 1. Terhadap ketentuan intern yang berlaku yang semula penerapannya baik tetapi di nilai cukup baik;

	2. Terhadap pemberitaan negatif terhadap Bank pada majalah Info Blora terkait kredit fiktif yang digunakan oleh salah satu perangkat di Kecamatan Tunjungan , dan telah terselesaikan oleh yang bersangkutan melalui klarifikasi dan penyelesaian yang bersangkutan secara kekeluargaan , hal ini yang menjadi faktor terjadinya penilaian
--	---

Blora, 27 April 2022

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BPR BKK Blora (Perseroda)


PUGUH HARYONO
Direktur Utama


IWANUDDIN ISKANDAR, SH.M Hum
Komisars Utama